

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diselenggarakan Pemilu pada Februari 2024 lalu, Indonesia telah menjalani masa transisi dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Keduanya unggul dalam suara Pemilu dan pada akhirnya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.¹ Kini sudah beberapa bulan Indonesia telah menjalani masa pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dilantik sejak Oktober lalu. Berbagai kebijakan perlahan mulai diselenggarakan sesuai dengan janji-janji yang mereka sampaikan pada saat masa kampanye. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, beberapa media menyoroti bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah yang menimbulkan polemik dan merugikan masyarakat Indonesia, diantaranya adalah terkait kenaikan PPN menjadi 12%, efisiensi anggaran serta pembatasan gas LPG 3 kilogram.² Banyak masyarakat Indonesia yang menyuarakan aspirasi bahwa kebijakan

¹ BPMI Setpres, *Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI* <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-resmi-dilantik-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri/>, diakses pada 30 Januari 2025, pkl. 15.44.

² Faisal Irfani, *Potret kebijakan publik pemerintahan Prabowo-Gibran – Viral dulu, cabut kemudian*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd0v8g47glvo>, diakses pada 1 Agustus 2025, pkl. 20.15.

pemerintahan Prabowo-Gibran pada saat ini kurang tersampaikan dengan baik kepada publik.

Dari pihak pemerintah sendiri juga menyadari bahwa komunikasi dan transparansi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah masih belum berjalan baik. Hal ini disampaikan oleh Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui media jurnalis Kompas. Beliau menyatakan bahwa pemerintah telah menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait dengan sosialisasi kebijakan pemerintah dan kedepannya akan menjadi bahan perbaikan.³ Aspirasi publik mengenai belum optimalnya sosialisasi kebijakan pemerintah terekam dalam jajak pendapat Kompas pada 10-13 Februari 2025. Hasil jajak pendapat menunjukkan, mayoritas responden (68,8%) menilai bahwa kebijakan, aturan, dan program baru pemerintah belum dapat di-sosialisasikan dengan baik. Padahal, 87% responden juga mengatakan, cara pemerintah berkomunikasi akan memengaruhi citra dan penilaian kinerja di mata publik.⁴

Contoh beberapa kebijakan pemerintah yang menuai polemik adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPn 12 persen yang dikritik masyarakat sejak beberapa bulan sebelum tahun 2024 berakhir. Kendati belum diterapkan, rencana kebijakan itu membuat harga beberapa komoditas terlanjur naik. Di tengah

³ Kurnia Yunita Rahayu, Nina Susilo, *Istana Akui Komunikasi dan Transparansi Kebijakan Masih Harus Diperbaiki*, <https://www.kompas.id/artikel/istana-akui-komunikasi-dan-tranparansi-kebijakan-masih-harus-diperbaiki>, diakses pada 15 April 2025, pkl 18.42.

⁴ Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan oleh Litbang Kompas pada 10-13 Februari 2025. Sebanyak 529 responden dari 38 provinsi berhasil diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian kurang lebih 4,22 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, *Ibid*.

situasi itu, pada akhir tahun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hanya barang-barang mewah yang dikenai PPn sebesar 12%. Demikian pula saat pemerintah melarang penjualan elpiji 3 kilogram secara eceran. Baik sosialisasi maupun persiapan implementasi kebijakan minim. Akibatnya, warga harus mengantre di mana-mana karena terjadi kelangkaan stok elpiji 3 kg. Kemudian, larangan penjual eceran menyalurkan elpiji 3 kilogram pun dicabut oleh Presiden sembari mendaftarkan para pengecer sebagai subpangkalan resmi.⁵

Berangkat dari situasi tersebut, sudah terpotret jelas dalam berbagai temuan di lapangan, di mana dari pihak pemerintah sendiri mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki komunikasi dan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan. Pola kebijakan yang dikeluarkan sering kali terkesan seperti "cek ombak," di mana kebijakan dilepas, dan ketika menghadapi penolakan publik yang masif, barulah pemerintah melakukan revisi atau bahkan pembatalan. Lebih jauh, kasus-kasus spesifik menunjukkan bagaimana proses perumusan regulasi penting, misalnya terkait organisasi pengelola aset BUMN (Danantara) dilakukan secara tertutup, sulit diakses oleh masyarakat, dan terkesan instan. Para ahli kebijakan publik menegaskan bahwa kegagalan ini bukan hanya masalah teknis sosialisasi, melainkan problem mendasar dalam tiga aspek: transparansi, penyusunan, dan substansi kebijakan itu sendiri.⁶ Intinya, kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspek partisipasi publik cenderung tidak dapat

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

mencerminkan kepentingan masyarakat dan pada akhirnya akan menimbulkan kontroversi atau penolakan.

Krisis legitimasi dan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah tersebut dapat dianalisis secara mendalam melalui lensa filsafat sosial yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas, khususnya gagasan tentang Rasionalitas Komunikatif (*Kommunikative Rationalität*) yang ditulis dalam *The Theory of Communicative Action* (Teori Tindakan Komunikatif).⁷

Habermas mendiagnosis bahwa masyarakat modern menghadapi krisis karena dominasi rasionalitas instrumental atau rasionalitas berorientasi tujuan (*Zweckrationalität*). Rasionalitas instrumental ini menekankan pada efisiensi, kontrol birokrasi, dan pencapaian target demi kepentingan sistem politik atau ekonomi. Dalam konteks pembuatan kebijakan pemerintah, rasionalitas instrumental mewujud dalam bentuk kebijakan yang dibuat secara teknokratis dan tertutup oleh para pejabat pemerintahan, dengan asumsi bahwa publik akan menerima keputusan yang dianggap paling "efisien" atau paling "benar" secara administratif. Proses ini, seperti yang diungkapkan oleh kritik dalam artikel tersebut, cenderung mengabaikan prosedur komunikasi yang adil dan partisipatif.

Sebagai kritik sekaligus solusi, Habermas memperkenalkan Rasionalitas Komunikatif. Rasionalitas ini berfokus pada pencapaian pemahaman bersama (*Verständigung*) melalui dialog yang jujur, terbuka, dan setara. Inti dari Tindakan

⁷ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*, trans. Thomas McCarthy, Boston: Beacon Press, 280.

Komunikatif adalah orientasi pada intersubjektivitas, di mana setiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan argumen, mengkritisi, dan mencari konsensus berdasarkan kekuatan argumen terbaik (*ungezwungene Zwang des besseren Arguments*), bukan paksaan kekuasaan. Habermas menyebut kondisi ideal ini sebagai Situasi Wicara Ideal (*Ideale Sprechsituation*), yang mensyaratkan: kebebasan berpartisipasi, kesetaraan kesempatan berbicara, tidak ada paksaan selain paksaan argumentasi, dan orientasi tulus pada konsensus.⁸

Habermas menyatakan bahwa rasionalitas komunikatif merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh subjek berdasarkan fakta yang ada di lingkungannya serta mampu mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut dengan bukti-bukti yang valid.⁹ Dalam lingkungan kelompok masyarakat, rasionalitas komunikatif ini menjadi jalan untuk menyampaikan gagasan-gagasan secara rasional melalui proses dialog atau diskusi demi mencapai kesepakatan bersama. Dalam rasionalitas komunikatif, sebuah diskusi disebut rasional jika pelaku memenuhi persyaratan wajib untuk mencapai kesepakatan bersama, mencapai pemahaman tentang sesuatu dalam realitas dengan salah satu peserta dalam komunikasi.¹⁰ Rasionalitas komunikatif pada akhirnya akan mengarahkan setiap individu pada relasi intersubjektif dengan sesamanya.

Berangkat dari penjelasan singkat di atas, penulis ingin mendalami makna rasionalitas komunikatif dari pemikiran Jürgen Habermas sebagai kritik serta upaya

⁸ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut Jürgen Habermas*, (Cet. V), Yogyakarta: Kanisius, 28.

⁹ Jürgen Habermas, *op.cit.*, 10

¹⁰ *Ibid.*, 11.

untuk merekonstruksi pemikiran modern yang bersifat instrumental. Rasionalitas komunikatif ini menjadi dasar pemahaman yang dapat direlevansikan dalam proses komunikasi dengan orang lain melalui diskusi, sehingga pemaknaan ini dapat diarahkan pada permasalahan atau isu-isu sosial politik dalam masyarakat. Penulis juga melihat bahwa pemikiran Habermas tentang rasionalitas komunikatif ini dapat menjadi salah satu solusi dan pertimbangan bagi masyarakat agar mereka saling terbuka satu sama lain dalam menyampaikan pendapat atau mencari solusi dalam menyampaikan gagasan maupun menyelesaikan setiap persoalan. Sehingga mereka tidak lagi saling menguasai dan mengintervensi yang berujung pada polemik-polemik yang dapat merugikan orang lain hanya demi mempertahankan tujuan individu tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan konteks yang telah dijelaskan, penulis berkeinginan untuk mengeksplorasi dan menelaah prinsip-prinsip rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas serta menghubungkan ide-ide tersebut dengan kondisi yang ada saat ini. Untuk itu, penulis mengusulkan pertanyaan guna memperdalam pengertian mengenai konsep tersebut. Berikut ini merupakan pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebagai perumusan isu:

- Apa rasionalitas komunikatif menurut Jürgen Habermas dalam karya *The Theory of Communicative Action*?

Penulis akan mengarahkan perhatian untuk menyelidiki atau mengeksplorasi penelitian tentang isu yang telah diangkat sebagai masalah yang dirumuskan. Oleh

karena itu, penulis akan menganalisis pertanyaan itu untuk memahami ide tentang rasionalitas komunikatif yang diajukan oleh Jürgen Habermas.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul “Rasionalitas Komunikatif menurut Jürgen Habermas dalam Buku *The Theory of Communicative Action*” yang memiliki dua sasaran. Sasaran pertama ialah untuk mencapai kelulusan Strata Satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sasaran kedua adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi gagasan rasionalitas komunikatif menurut pandangan Jürgen Habermas dalam buku pertamanya, *The Theory of Communicative Action*.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Sumber Data

Dalam pelaksanaan skripsi ini, penulis akan menerapkan metode penelitian yang berfokus pada kualitas. Pendekatan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian literatur, terkhusus mengenai ide-ide Jürgen Habermas mengenai rasionalitas komunikatif. Buku yang dijadikan sumber utama adalah karya Jürgen Habermas yang berjudul *The Theory of Communicative Action*, khususnya pada bab pertama dari buku pertama. Di samping itu, penelitian ini juga akan didukung oleh referensi sekunder yang lain.

1.4.2. Metode Analisis Data

Penulis akan mengadopsi jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji konsep pemikiran Jürgen Habermas serta melakukan analisis terhadap ide-ide

Jürgen Habermas, terutama yang berkaitan dengan rasionalitas komunikatif dalam karyanya yang berjudul *The Theory of Communicative Action*. Teknik yang diterapkan untuk menganalisis teks dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan hermeneutika, yang mencakup tahapan interpretasi dan kontinuitas historis.

Penulis akan menggunakan unsur interpretasi teks untuk merekonstruksi sumber primer, yakni *The Theory of Communicative Action vol.1* karya Jürgen Habermas dan sumber-sumber sekunder lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mendalami isi dari karya tersebut sehingga penulis dapat menangkap maksud dari apa yang disampaikan oleh Jürgen Habermas, secara khusus melalui pemikirannya mengenai rasionalitas komunikatif. Selain itu dalam buku sekunder, terdapat tulisan-tulisan dari para komentator yang mengkritisi dan menganalisis rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas. Unsur interpretasi ini berguna bagi penulis untuk menyingkap maksud dari komentator dalam mengkritisi karya Jürgen Habermas.

Kemudian penulis juga akan menggunakan unsur kesinambungan historis yang berguna untuk melihat keterkaitan antara pemikiran Jürgen Habermas, baik dengan kondisi lingkungan disekitar dan pengaruhnya maupun dengan sejarah hidupnya secara pribadi. Selain itu unsur ini juga digunakan untuk penulis guna menyelidiki latar belakang eksternal dan latar belakang internal dari sejarah hidup Jürgen Habermas.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. *THE THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION (VOL. 1)*

karya Jürgen Habermas

"The Theory of Communicative Action " adalah sebuah buku karya Jürgen Habermas yang diterbitkan pada tahun 1981 dalam dua jilid, yang pertama berjudul "Alasan dan Rasionalisasi Masyarakat" (*"Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung"*) dan buku kedua dengan judul *"Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason"* (*"Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft"*). Teori tindakan komunikatif merupakan salah satu karya teoretis yang penting dan banyak dipelajari pada abad ke-20. Teori ini berupaya untuk mengkritik pemikiran Marxis yang fokus pada bidang ekonomi dan sosial. Teori Marx menganggap bahwa tenaga kerja yang teralienasi menjadi faktor utama atau satu-satunya penentu peristiwa penindasan. Dalam menanggapi, Habermas beranggapan bahwa kunci pembebasan dapat ditemukan dalam bahasa dan komunikasi antar manusia.

Dalam buku pertama, yang menjadi buku sumber utama penulis, Jürgen Habermas telah mengulas konsep-konsep mendasar tentang teori komunikasi. Pemikiran filsafat muncul berdasarkan hasil refleksi atas rasio yang terkandung dalam kognisi, tutur kata atau bicara, dan tindakan. Dengan demikian rasio menjadi tema dasar dari pemikiran filsafat.

Komunikasi menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan Teori kritis yang ditawarkan oleh pendahulunya. Jürgen Habermas membedakan

antara pekerjaan dan komunikasi (interaksi). Pekerjaan merupakan tindakan instrumental, jadi sebuah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah tindakan untuk saling mengerti.¹¹ Jurgen Habermas juga memberi pemahaman bahwa masyarakat yang komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, tetapi melalui argumentasi yang efektif.¹²

1.5.2. MORAL CONSCIOUSNESS AND COMMUNICATIVE ACTION karya Jürgen Habermas

Buku ini membantu penulis untuk mengetahui pandangan Habermas dalam mengembangkan berbagai permasalahan moral dan etika. Berdasarkan teorinya tentang tindakan komunikatif, Habermas menguraikan konsep tentang 'etika wacana', Habermas merekonstruksi sudut pandang moral dimana klaim-klaim normatif dapat dinilai tanpa keberpihakan.

Inti dari buku ini adalah bahwa Habermas ingin menghubungkan etika dalam proses komunikatif dengan teori tindakan sosial melalui pemeriksaan penelitian dalam psikologi sosial perkembangan moral dan interpersonal. Hal ini dimaksudkan agar intuisi moral dasar kita muncul dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih universal.

¹¹ *Ibid.*, 23

¹² *Ibid.*

1.5.3. *MENUJU MASYARAKAT KOMUNIKATIF* karya F. Budi

Hardiman

Buku karya Budi Hardiman ini berisi tentang situasi masyarakat saat ini yang tidak lepas dari paradigma komunikasi. Menurut penulis, komunikasi menjadi salah satu unsur terpenting dalam hidup sosial dan hidup bermasyarakat. Habermas mencita-citakan masyarakat yang mempunyai kesadaran akan pentingnya tindakan komunikatif untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan lewat kekerasan, melainkan lewat ‘argumentasi’. Habermas membedakan argumentasi menjadi diskursus/perbincangan (*discourse*) dan kritik. Diskursus untuk mencapai konsensus atas klaim kebenaran disebut; diskursus teoritis”; untuk mencapai konsensus atas klaim ketepatan disebut “diskursus praktis”; diskursus untuk mencapai konsensus tentang klaim komprehensibilitas disebut “diskursus praktis”. Meskipun dimaksudkan untuk konsensus, komunikasi juga bisa terganggu, sehingga kita tak perlu mengandaikan konsensus. Buku ini cukup membantu untuk memperjelas makna tindakan komunikatif menurut Habermas secara khusus dalam Bahasa Indonesia.

1.5.4. *COMMUNICATIVE ACTION AND RATIONAL CHOICE* karya

Joseph Heath

Dalam buku ini, membahas pemikiran Jurgen Habermas tentang tindakan komunikatif dalam sebuah dialog. Pertama, Heath memulai

tulisannya dengan sebuah tinjauan secara umum mengenai teori tindakan komunikatif menurut Habermas dan kritiknya terhadap rasionalitas instrumental. Heath melalui kasus ini berupaya menawarkan alternatif untuk penggunaan teori tindakan tutur menurut Habermas untuk menjelaskan tatanan sosial serta berupaya menguraikan teori tindakan rasional yang bersifat komunikatif.

Pada bagian kedua, Heath membahas secara filosofis mengenai konsepsi Habermas tentang rasionalitas praktis. Dia mengkritik upaya Habermas untuk memperkenalkan prinsip universalisasi yang mengatur wacana moral, serta kriterianya untuk membedakan antara masalah moral dan etika.

Menurut Heath, teori tindakan komunikatif Habermas merupakan upaya yang terbaik untuk menghasilkan sebuah teori umum tentang tindakan sosial. Dalam hal ini Habermas berhasil mengatasi teori sosiologi klasik dan teori pilihan rasional kontemporer.¹³

1.6. Skema Penulisan

Pada skripsi yang berjudul “Rasionalitas Komunikatif menurut Jürgen Habermas dalam bab I buku *The Theory of Communicative Action* vol.1”, penulis menggunakan skema penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

¹³ Joseph Heath, *Communicative Action and Rational Choice*, Cambridge: The MIT Press, 17-18

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, tinjauan pustaka, dan skema penulisan.

Bab II: Latar Belakang Pemikiran Jürgen Habermas

Bab ini berisi latar belakang kehidupan dan konteks historis Jürgen Habermas, para pemikir serta gagasannya yang memengaruhi, tinjauan filsafat Habermas serta kesimpulan dari seluruh pembahasan di bab II

Bab III: Gagasan Rasionalitas Komunikatif menurut Jürgen Habermas

Bab ini berisi penjelasan penulis terkait rasionalitas komunikatif menurut Jürgen Habermas berdasarkan penelitian dalam buku *The Theory of Communicative Action, vol.I*, secara khusus pada bagian bab I.

Bab IV: Penutup

Bab ini berisi tinjauan kritis atas gagasan rasionalitas komunikatif menurut Jürgen Habermas serta relevansinya dalam dinamika sosial politik di Indonesia.